



BAB II

KAJIAN PUSTAKA



Hak cipta milik IBIKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai teori yang mendasari topik skripsi serta bagaimana kaitannya dengan *corporate governance* dan manajemen laba. Untuk lebih memahami isi dari penelitian ini, maka akan diberikan pula penjelasan mendalam mengenai apa yang dikenal dengan *corporate governance*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dan manajemen laba. Peneliti juga melampirkan bagan penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian.

Kerangka pemikiran menggambarkan alur logika hubungan masing-masing variabel penelitian agar dapat dimengerti dengan baik oleh pembaca. Selain itu akan dijelaskan pula bagaimana hubungan dari masing-masing variabel tersebut. Dari penjelasan teori yang dijelaskan sebelumnya maka pada bagian akhir dari bab ini, peneliti dapat menarik hipotesis yang merupakan jawaban sementara berdasarkan teori dari masalah yang akan diteliti.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan hubungan antara *agent* (manajemen suatu usaha) dan *principal* (pemilik usaha) yang disebut juga dengan hubungan keagenan (*agency relationship*). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana salah satu atau lebih pemegang saham (*principal*) memerintahkan manajer (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* serta memberikan wewenang kepada *agent* untuk membuat



keputusan yang terbaik bagi *principal*. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, manajer tidak selalu bertindak berdasarkan kepentingan *principal*.

Menurut Scott (2015: 358), teori agensi merupakan cabang dari permainan teori yang mempelajari hubungan yang dapat memotivasi *agent* secara rasional untuk dapat berperan atas nama *principal* ketika kepentingan *agent* tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan dari *principal*. Menurut teori keagenan (*agency theory*), adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan dalam suatu perusahaan dapat menimbulkan permasalahan keagenan (*agency problem*), yaitu munculnya konflik kepentingan antara pemilik atau pemegang saham dengan manajer sebagai pengelola perusahaan.

Teori agensi mengasumsikan bahwa *agent* sebagai individu yang rasional, memiliki kepentingan pribadi (*self-interest*) dan memiliki keinginan untuk memaksimalkan kepentingannya. Eisenhardt (1989) menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia guna menjelaskan tentang teori agensi yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk adverse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut, manajer sebagai manusia kemungkinan besar akan bertindak berdasarkan sifat *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingannya.

Adanya kepentingan dan keinginan pribadi tersebut memunculkan ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*) karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara *principal* dan *agent* yang akibatnya menimbulkan dua permasalahan yang disebabkan adanya kesulitan *principal* untuk mengawasi dan melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan *agent*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Eisenhardt (1989) ada dua jenis masalah kontrak antara *principal*

dengan *agent*, yaitu: *adverse selection* dan *moral hazard*. *Moral hazard*, yaitu permasalahan yang muncul jika manajer tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja yang artinya agen telah melakukan kelalaian. *Adverse selection* merupakan suatu keadaan di mana pemegang saham tidak dapat memverifikasi keterampilan atau kemampuan agennya baik pada saat perekrutan atau dalam pekerjaannya karena biasanya agen mengaku memiliki kemampuan atau keterampilan ketika agen dipekerjakan. Masalah keagenan muncul karena (1) *principal* dan *agent* memiliki tujuan yang berbeda; (2) *principal* tidak dapat menentukan apakah *agent* berperilaku dengan tepat.

Manajer cenderung memiliki informasi internal perusahaan yang relatif lebih banyak dan mengetahui informasi tersebut lebih cepat dibandingkan dengan pihak eksternal. Kondisi ini memberikan kesempatan kepada manajer dalam menggunakan informasi yang diketahuinya untuk memanipulasi pelaporan keuangan sebagai usaha untuk memaksimalkan kemakmurannya, dan menyesatkan pemilik atau pemegang saham mengenai kinerja ekonomi perusahaan.

Konsep *corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para pemilik (pemegang saham) yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan melakukan kecurangan-kecurangan yang akan merugikan para pemegang saham. Dengan kata lain dengan penerapan *Corporate Governance* diharapkan dapat berfungsi untuk menekankan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*).

Perilaku manipulasi oleh manajer yang berawal dari konflik kepentingan dan adanya asimetri informasi ini dapat diminimumkan melalui suatu mekanisme *monitoring* yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan tersebut,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yaitu mekanisme *corporate governance*. *Corporate governance* diharapkan mampu berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*). Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada *agency theory* di mana pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan berlaku.

2. Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*)

Teori akuntansi positif menurut Scott (2009: 284):

“positive accounting theory (PAT) is concerned with predicting such action as the choices of accounting policies by firm managers and how managers will respond to proposed new accounting standards.”

Teori akuntansi positif merupakan teori yang mengidentifikasi dan menganalisis berbagai bentuk praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Teori ini secara khusus bertujuan untuk mengungkapkan pengaruh variabel-variabel ekonomi terhadap motivasi manajer untuk memilih suatu metode akuntansi. Teori ini mengasumsikan manajer selalu berfikir rasional dan akan memilih kebijakan akuntansi yang dapat memberi keuntungan kepada mereka.

Dalam teori akuntansi positif terdapat tiga hipotesis yang dijadikan dasar pemahaman tindakan manajemen laba (Watts dan Zimmerman, 1986) yaitu:

a. *The Bonus Plan Hypothesis*

Bonus Plan Hypothesis menyatakan bahwa *“managers of firms with bonus plans are more likely to choose accounting procedures that shift reported earnings from future periods to the current period”*. Pada perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus, manajer perusahaan akan lebih memilih metode akuntansi yang dapat menggeser laba dari masa depan ke masa kini sehingga



dapat menaikkan laba saat ini. Hal ini dikarenakan manajer lebih menyukai pemberian upah yang lebih tinggi untuk masa kini.

Seandainya pada tahun tertentu laba sesungguhnya berada di bawah syarat untuk menerima bonus, maka manajer akan melakukan manajemen laba agar laba yang akan dilaporkan mencapai tingkat minimal untuk memperoleh bonus. Sebaliknya, jika pada tahun tertentu laba sesungguhnya jauh diatas jumlah yang disyaratkan untuk mendapat bonus, maka manajer akan mengelola/ mengatur agar laba yang dilaporkan tidak diatas batas laba tertinggi untuk mendapatkan bonus karena manajer tidak akan mendapat bonus tambahan. Kedua upaya ini dilakukan agar manajer selalu memperoleh bonus pada setiap periode.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. *The Debt to Equity Hypothesis (Debt Covenant Hypothesis)*

Debt to Equity Plan Hypothesis menyatakan bahwa “*the larger a firm’s debt to equity ratio, the more likely the firm’s manager is to select accounting procedures that shift reported earnings from future periods to the current period*”. Pada perusahaan yang mempunyai rasio *debt to equity* tinggi, manajer perusahaan cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau laba. Perusahaan dengan rasio *debt to equity* yang tinggi akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tambahan dari pihak kreditor bahkan perusahaan terancam melanggar perjanjian utang.

c. *The Political Cost Hypothesis (Size Hypothesis)*

Political Cost Hypothesis menyatakan bahwa “*the larger the firm, the more likely the manager is to choose accounting procedures that defer reported earnings from current to future periods*”. Ada beberapa regulasi yang dikeluarkan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha, salah satunya undang-undang perpajakan. Besar kecilnya pajak yang akan ditarik pemerintah tergantung pada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



besar kecilnya laba perusahaan. Hal ini membuat manager untuk melakukan tindakan manajemen laba dengan cara mengakui pendapatan periode berjalan menjadi pendapatan periode mendatang, sehingga laba perusahaan tidak terlalu tinggi yang membuat pajak yang dibayarkan juga lebih rendah.

3. Manajemen Laba

a. Definisi Manajemen Laba (*Earnings Management*)

(1) Menurut Scott (2015: 445)

“Earnings management is the choice by a manager of accounting policies, or real actions, affecting earnings so as to archive some specific reported earnings objective.”

(Manajemen laba merupakan pilihan manajer atas kebijakan akuntansi atau tindakan nyata, yang mempengaruhi laba dalam mendokumentasikan beberapa tujuan laba yang spesifik).

(2) Menurut Healy dan Wahlen (1999: 368)

“Earnings management occurs when managers use judgment in financial reporting and in structuring transactions to alter financial reports to either mislead some stakeholders about the underlying economic performance of the company, or to influence contractual outcomes that depend on reported accounting numbers.”

(Manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan keputusan dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk mengubah laporan keuangan sehingga menyesatkan stakeholders tentang kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil yang berhubungan dengan kontrak yang tergantung pada angka akuntansi yang dilaporkan).

(3) Menurut Kieso *et al.*, (2014: 137)

“Earnings management is often defined as the planned timing of revenue, expense, gains, and losses to smooth out bumps in earnings”.

“Manajemen laba sering didefinisikan sebagai waktu perencanaan dari pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian untuk meratakan laba yang bergejolak”.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Secara umum manajemen laba dapat dikatakan sebagai suatu dampak dari kebebasan seorang manajer untuk memilih dan menggunakan metode akuntansi tertentu ketika mencatat dan menyusun informasi dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena adanya beragam metode dan prosedur akuntansi yang diakui dan diterima dalam prinsip akuntansi berterima umum (*generally accepted accounting principles*). Jadi apabila aktivitas manajer dilakukan masih dalam kerangka prinsip akuntansi yang diterima secara umum, maka dalam hal ini manajemen laba tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan curang/ *fraud* (Sulistyanto, 2014).

b. Perspektif Manajemen Laba

Dua perspektif manajemen laba yang dilihat dari *contracting perspective* menurut Scott (2015: 465-471) yaitu :

(1) *Opportunistic Behavior*

Dalam perspektif ini, manajemen laba yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Manajemen laba yang termasuk dalam perspektif ini adalah manajemen laba untuk memperoleh bonus, mempengaruhi kontrak hutang dengan kreditur, dan alasan politik yang tidak tepat.

(2) *Efficient Contracting*

Dalam perspektif ini, manajer diberikan beberapa wewenang untuk *manage* laba dalam menghadapi kontrak yang tidak lengkap dan kaku. Fleksibilitas ini digunakan manager untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak.



c. Bentuk-Bentuk Manajemen Laba

Bentuk-bentuk manajemen laba yang dilakukan manajer menurut Scott (2015: 447) antara lain:

(1) *Taking a bath*

Teknik ini dilakukan pada saat keadaan perusahaan buruk dan kerugian tidak dapat dihindari pada periode berjalan dengan cara mengakui biaya-biaya pada periode yang akan datang dan menghapus aktiva pada periode berjalan. Hal ini dilakukan agar periode mendatang laba yang dihasilkan lebih tinggi daripada seharusnya.

(2) *Income Minimization*

Cara ini dilakukan pada saat perusahaan memperoleh laba yang tinggi dengan tujuan agar tidak mendapat perhatian secara politis. Biasanya dilakukan saat perusahaan sedang mendapat sorotan publik selama masa keuntungan sangat tinggi atau untuk menghindari pajak. Caranya dengan penghapusan yang lebih cepat untuk barang modal dan asset tak berwujud, pembebanan untuk biaya-biaya di masa depan, pemilihan metode akuntansi tertentu dan sebagainya.

(3) *Income Maximization*

Memaksimalkan laba yang dilakukan oleh manajer untuk mendapatkan bonus yang lebih besar dan untuk menghindari perusahaan dari pelanggaran atas kontrak utang jangka panjang. Peningkatan laba dapat dilakukan dengan memilih metode-metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba, yaitu dengan mengakui pendapatan yang sewajarnya diakui di masa depan dan menunda pembebanan yang seharusnya sudah dilakukan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(4) *Income Smoothing*

Perataan laba merupakan bentuk yang paling populer dari manajemen laba. Melalui *income smoothing*, manajer menaikkan atau menurunkan laba untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan sehingga perusahaan terlihat stabil dan tidak beresiko tinggi. Kegunaannya adalah untuk menarik dan meyakinkan calon investor, membuat kinerja perusahaan tampak meningkat dengan stabil, pada akhirnya menurunkan biaya modal.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

d. Model Empiris Manajemen Laba

Model empiris bertujuan untuk mengindikasikan manajemen laba, pertama kali dikembangkan oleh Healy, DeAngelo, model Jones, serta model Jones dengan modifikasi (Sulistyanto, 2014: 216-232).

(1) Model Healy

Model empiris untuk mengindikasikan manajemen pertama kali dikembangkan oleh Healy pada tahun 1985. Secara umum model ini tidak berbeda dengan model-model lain yang dipergunakan untuk mengindikasikan *earnings management* dalam menghitung nilai total akrual (TAC), yaitu mengurangi laba akuntansi yang diperolehnya selama satu periode tertentu dengan arus kas operasi periode bersangkutan.

$$TAC = Net\ Income - Cash\ Flow\ from\ Operation$$

Untuk menghitung *nondiscretionary accruals*, model healy membagi rata-rata total akrual (TAC) dengan total aktiva periode sebelumnya. Oleh sebab itu total akrual selama periode estimasi merupakan representasi ukuran *nondiscretionary accruals* dan dirumuskan sebagai berikut:

$$NDA_t = \frac{\sum TA}{T}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Keterangan:

- NDA = *Nondiscretionary accruals*
TAC = Total akrual yang diskala dengan total aktiva periode t-1
T = 1,2,... T merupakan tahun *subscript* untuk tahun yang dimasukkan dalam periode estimasi
t = Tahun *subscript* yang mengindikasikan tahun dalam periode estimasi.

(2) Model De Angelo

Model lain untuk mengindikasikan *earnings management* dikembangkan oleh DeAngelo pada tahun 1986. Secara umum model ini juga menghitung total akrual (TAC) sebagai selisih antara laba akuntansi yang diperoleh suatu perusahaan selama satu periode dengan arus kas periode bersangkutan atau dirumuskan sebagai berikut:

$$TAC = Net\ income - Cash\ Flow\ from\ Operations$$

Model DeAngelo mengukur atau memproksikan *earnings management* dengan *nondiscretionary accruals*, yang dihitung dengan menggunakan total akrual akhir periode yang diskala dengan total aktiva periode sebelumnya.

Atau dirumuskan sebagai berikut:

$$NDA_t = TAC_{t-1}$$

Keterangan:

- NDA_t = *Discretionary accruals* yang diestimasi
TAC_t = Total akrual periode t
TA_{t-1} = Total aktiva periode t-1

(3) Model Jones

Model Jones dikembangkan oleh Jones (1991), ini tidak lagi menggunakan asumsi bahwa *nondiscretionary accruals* adalah konstan. Model Jones mengusahakan untuk mengendalikan pengaruh perubahan kondisi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perekonomian perusahaan terhadap *nondiscretionary accruals*. Selain itu, model ini menggunakan dua asumsi sebagai dasar pengembangan:

- a) AkruaI periode berjalan (*current accruals*), yaitu perubahan dalam rekening modal kerja, merupakan hasil dari perubahan yang terjadi di lingkungan ekonomi perusahaan yang dihubungkan dengan perubahan penjualan, sehingga semua variabel yang digunakan akan dibagi dengan aktiva atau penjualan periode sebelumnya.
- b) *Gross property, plant and equipments* merupakan salah satu komponen utama yang digunakan untuk menghitung total akruaI, khususnya untuk biaya depresiasi *nondiscretionary*.

Atas dasar dua asumsi diatas, untuk menghitung total akruaI, model ini menghubungkan total akruaI dengan perubahan penjualan dan *gross property, plant and equipment*. Sementara untuk menghitung *nondiscretionary accruals* di tahun peristiwa model ini dirumuskan sebagai berikut:

$$NDA_t = \alpha_1 \frac{1}{TA_{t-1}} + \alpha_2 \frac{\Delta REV_t}{TA_{t-1}} + \alpha_3 \frac{PPE_t}{TA_{t-1}}$$

Keterangan:

ΔREV_t = Pendapatan tahun t dikurangi pendapatan periode t-1

PPE_t = *Gross property, plant, and equipment* periode t

TA_{t-1} = Total aktiva periode t-1

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ = *Firm specific parameters*

Estimasi $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ dihitung selama periode estimasi dengan menggunakan model sebagai berikut:

$$\frac{TAC_t}{TA_{t-1}} = \alpha_1 \left[\frac{1}{TA_{t-1}} \right] + \alpha_2 \left[\frac{\Delta REV_t}{TA_{t-1}} \right] + \alpha_3 \left[\frac{PPE_t}{TA_{t-1}} + v_t \right] + \Sigma$$

Keterangan:

TAC = Total akruaI

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(4) Model Jones Dimodifikasi (*Modified Jones*)

Model Jones dimodifikasi (*modified jones model*) merupakan modifikasi dari model Jones yang didesain untuk mengeleminasi kecenderungan perkiraan yang bisa salah dari model Jones untuk menentukan *discretionary accruals* ketika *discretion* melebihi pendapatan. Model ini menggunakan *discretionary accruals* sebagai proksi *earnings management*.

Model ini menggunakan *total accrual (TAC)* yang diklasifikasikan menjadi komponen *discretionary (DA)* dan *non discretionary (NDA)*.

$$TAC = Net\ income - Cash\ Flow\ from\ Operation \dots\dots\dots(1)$$

Nilai *total accrual* yang disetimasi dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$TAC_t/TA_{t-1} = a_1[1/TA_{t-1}] + a_2[\Delta SAL_t/TA_{t-1}] + a_3[PPE_t/TA_{t-1}] + \phi_t \dots\dots\dots(2)$$

Dengan menggunakan koefisien regresi di atas (a_1 , a_2 , dan a_3) nilai *non discretionary accrual (NDA)* dapat dihitung dengan rumus:

$$NDA = a_1[1/TA_{t-1}] + a_2[(\Delta SAL_t - \Delta REC_t)/TA_{t-1}] + a_3[PPE_t/TA_{t-1}] \dots\dots\dots(3)$$

Selanjutnya DA dapat dihitung sebagai berikut:

$$DA_t = TAC_t/TA_{t-1} - NDA \dots\dots\dots(4)$$

Keterangan:

- TAC = *Total accrual* dalam periode t.
- DA = *Discretionary accruals*.
- TA = Total Asset periode t-1.
- ΔSAL_t = Perubahan penjualan bersih dalam periode t.
- ΔREC_t = Perubahan piutang bersih dalam periode t.
- PPE_t = *Property, plan, and equipmet* atau *fixed asset*
- NI = *Net income* perusahaan i pada periode t.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- CFO_{it} = *Cash Flow from Operation* perusahaan i pada periode t .
- a_1, a_2, a_3 = Koefisien regresi persamaan (2)
- a_1, a_2, a_3 = *Fitted coefficient* yang diperoleh dari hasil regresi persamaan (2)

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Corporate Governance

a. Definisi Corporate Governance

Menurut FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesia, 2006*)

yang bertujuan untuk mengembangkan *corporate governance* di Indonesia:

“*Corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Tujuan dari *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders)”.

Menurut Sulistyanto (2014: 134):

“Secara definitif *good corporate governance* diartikan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar perusahaan itu menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholdernya*”.

Menurut PT Bursa Efek Indonesia (2011: 4):

“Tata Kelola Perusahaan atau *Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berlandaskan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen serta kewajaran dan kesetaraan. Tujuan utama dilaksanakannya *Good Corporate Governance* adalah untuk mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya dalam jangka panjang”.

b. Asas-Asas Corporate Governance

Ada lima asas dalam *corporate governance* dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006), antara lain:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(1) *Transparansi (Transparency)*

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

(2) *Akuntabilitas (Accountability)*

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

(3) *Responsibilitas (Accountability)*

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

(4) *Independensi (Independency)*

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(5) Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

c. Prinsip-prinsip yang melandasi *Corporate Governance*

Prinsip-prinsip *corporate governance* yang dikembangkan oleh *Organisation for Economic Co-Operation and Development* (OECD, 2004) meliputi:

(1) Menjamin Kerangka Dasar *Corporate Governance* yang Efektif

Dalam rangka memastikan terciptanya kerangka *corporate governance* yang efektif diperlukan kerangka hukum yang efektif. Selanjutnya pengaturan dan kelembagaan yang ada juga harus dapat menjamin semua pihak dalam menjalankan kegiatannya. Sehingga dalam prinsip ini ditekankan bahwa *corporate governance* harus dapat mendorong terciptanya pasar yang transparan dan efisien, sejalan dengan perundangan dan peraturan yang berlaku, dan dapat dengan jelas memisahkan fungsi dan tanggung jawab otoritas-otoritas yang memiliki pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum.

(2) Hak-Hak Pemegang Saham dan Fungsi-Fungsi Penting Kepemilikan Saham

Prinsip ini pada dasarnya mengatur mengenai hak-hak para pemegang saham dan fungsi-fungsi kepemilikan saham. Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham. Hak-hak tersebut antara lain: menjamin keamanan metode pendaftaran atas kepemilikan, menyerahkan atau mengalihkan saham,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memperoleh informasi yang relevan atau material tentang perusahaan secara teratur dan tepat waktu, ikut berpartisipasi dan memberikan hak suara dalam rapat umum pemegang saham, memilih dan mengganti anggota pengurus (dewan komisaris dan dewan direksi), dan memperoleh hak atas bagian keuntungan perusahaan.

(3) Perlakuan yang Sama terhadap Pemegang Saham

Pada prinsip ini ditekankan perlunya persamaan perlakuan kepada seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing dari kecurangan, perdagangan, dan penyalahgunaan oleh orang dalam (*insider trading*). Pada praktiknya pemegang saham utama perusahaan mempunyai kesempatan lebih baik untuk memberikan pengaruh dalam kegiatan operasional perusahaan. Dari praktik ini, seringkali transaksi yang terjadi memberikan manfaat hanya kepada pemegang saham utama atau bahkan untuk kepentingan direksi dan komisaris. Dari kemungkinan terjadinya usaha-usaha yang dapat merugikan kepentingan investor, baik lokal maupun asing, maka prinsip ini menyatakan bahwa untuk melindungi investor, perlu suatu informasi yang jelas mengenai hak dari pemegang saham.

(4) Peranan *stakeholders* dalam *Corporate Governance*

Prinsip ini menyatakan bahwa kerangka *corporate governance* harus mengakui hak *stakeholders* yang dicakup oleh perundang-undangan atau perjanjian (*mutual agreements*) dan mendukung secara aktif kerjasama antara perusahaan dan *stakeholders* dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan yang berkesinambungan (sustainability) dari kondisi keuangan perusahaan yang dapat diandalkan. Sumber daya yang dimiliki *stakeholders* tersebut harus dialokasikan secara efektif untuk

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



meningkatkan efisiensi dan kompetisi perusahaan jangka panjang. Hal tersebut dapat tercapai dengan penerapan kerangka *corporate governance* dalam pengelolaan perusahaan yaitu dengan adanya jaminan dari perusahaan tentang perlindungan kepentingan para pemangku kepentingan baik melalui perundang-undangan maupun perjanjian.

(5) Keterbukaan dan Transparansi

Prinsip ini mengatur bahwa kerangka kerja *corporate governance* harus memastikan bahwa keterbukaan informasi yang tepat waktu dan akurat dilakukan atas semua hal yang material berkaitan dengan perusahaan, termasuk di dalamnya keadaan keuangan, kinerja, kepemilikan, dan tata kelola perusahaan. Pengungkapan tersebut harus disusun, disajikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan diaudit oleh auditor eksternal yang independen.

(6) Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

Prinsip ini menyatakan bahwa kerangka kerja *corporate governance* harus memastikan pedoman strategis perusahaan, monitoring yang efektif terhadap manajemen oleh dewan, serta akuntabilitas dewan terhadap perusahaan dan pemegang saham. Menurut prinsip ini, tanggung jawab dewan yang utama adalah memonitor kinerja manajerial dan mencapai tingkat imbal balik (*return*) yang memadai bagi pemegang saham. Di sisi lain pihak, dewan juga harus mencegah timbulnya benturan kepentingan dan menyeimbangkan berbagai kepentingan di perusahaan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



d. Manfaat dan Keuntungan Penerapan *Corporate Governance*

Dengan diterapkannya *corporate governance* di tiap perusahaan akan dapat memberikan manfaat. Menurut Herawaty (2008), penerapan akan dapat memberikan manfaat antara lain:

(1) Meminimalkan *agency cost*

Selama ini para pemegang saham harus menanggung biaya yang timbul dari adanya pendelegasian wewenang kepada manajemen. Biaya ini dapat berupa kerugian karena manajemen menggunakan sumber daya manusia untuk kepentingan pribadi maupun biaya pengawasan yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Dengan penyusunan struktur dan pembagian fungsi yang baik, biaya ini dapat ditekan seminimal mungkin dengan mengontrol konflik kepentingan yang mungkin terjadi antara *principal* dan *agent*.

(2) Meminimalkan *cost of capital*

Perusahaan yang dikelola dengan baik dan sehat akan menciptakan suatu referensi positif bagi pihak kreditur. Kondisi ini sangat berperan dalam meminimalkan biaya modal yang harus ditanggung bila perusahaan mengajukan pinjaman. Disamping dapat memperkuat kinerja keuangan. Kondisi tersebut juga akan membuat produk yang dihasilkan perusahaan menjadi kompetitif di pasar.

(3) Meningkatkan nilai perusahaan

Hal utama yang dilihat oleh seorang investor sebelum menanamkan modalnya di suatu perusahaan adalah nilai dari perusahaan tersebut. Jika nilai perusahaan baik, maka investor akan semakin tertarik untuk menanamkan modalnya. Sebuah perusahaan yang menerapkan *corporate governance*

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



diharapkan mampu mengurangi *cost of capital* sehingga nilai perusahaan tersebut akan meningkat.

(4) Meningkatkan citra perusahaan

Citra yang melekat pada suatu perusahaan adalah hal penting. Dalam beberapa kasus, biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperbaiki citra lebih mahal dibanding dengan keuntungan yang diperoleh dengan mengabaikannya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

e. Mekanisme *Corporate Governance*

Berikut ini adalah beberapa mekanisme *corporate governance* yang digunakan untuk mengawasi berjalannya sistem tata kelola perusahaan:

(1) Kepemilikan Manajerial

Pihak manajemen dari sebuah perusahaan publik umumnya bukan terdiri dari pemilik/ pemegang saham. Untuk mengelola perusahaan, para pemilik/ pemegang saham mempekerjakan para *agent*. Manajer umumnya memiliki informasi yang lebih banyak mengenai perusahaan dibandingkan dengan pemilik/ pemegang saham karena manajer yang menjadi pengelola perusahaan. Hal inilah yang mengakibatkan ketidakseimbangan informasi antara *principal* dan *agent* (Jensen dan Meckling, 1976).

Ketidakseimbangan informasi ini disebut dengan asimetri informasi. Karena adanya asimetri informasi dan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*, maka hal ini memotivasi manajer untuk menyajikan informasi yang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya kepada *principal*. Tekanan dari pasar modal juga dapat menyebabkan perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang rendah akan memilih metode akuntansi yang meningkatkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



laba yang dilaporkan, yang sebenarnya tidak mencerminkan keadaan ekonomi dari perusahaan yang bersangkutan (Boediono, 2005: 176-177).

Solusi dari permasalahan di atas adalah menyamakan kepentingan antara pemilik/ pemegang saham dengan manajer, yaitu dengan cara manajer memiliki saham perusahaan tersebut. Hal ini menjadikan manajer juga sebagai pemilik selain sebagai pengelola perusahaan. Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen, sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah juga sekaligus sebagai seorang pemilik (Siallagan dan Machfoedz, 2006: 5).

(2) Kepemilikan Institusional

Permasalahan keagenan yang berawal dari konflik kepentingan ini dapat diminimumkan dengan suatu mekanisme *monitoring* yang bertujuan untuk mensejajarkan kepentingan antara pemilik/ pemegang saham dengan manajer. Salah satu cara adalah dengan kepemilikan saham oleh investor institusional. Investor institusional ini adalah investor yang bukan dalam bentuk individual, melainkan merupakan perusahaan, lembaga atau institusi yang turut memiliki saham.

Dalam hubungannya dengan fungsi *monitoring*, investor institusional diyakini memiliki kemampuan untuk memonitor tindakan manajemen lebih baik dari investor individual. Investor institusional akan melakukan *monitoring* secara lebih efektif dan tidak mudah diperdaya dengan tindakan manipulasi yang dilakukan manajer. Kepemilikan institusional yang besar



dapat mengurangi sifat *opportunistic* manajer dengan kemampuan *monitoringnya* sehingga dapat meminimalisir permasalahan keagenan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(3) Ukuran Dewan Direksi

Dewan direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Menurut KNKG (2006) agar pelaksanaan tugas direksi dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:

- (a) Komposisi direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
- (b) Direksi harus profesional yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.
- (c) Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan (*profitability*) dan memastikan kesinambungan usaha perusahaan.
- (d) Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh dewan direksi dipengaruhi oleh jumlah atau ukuran dewan direksi dalam suatu perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(4) Ukuran Dewan Komisaris

Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem *two tier*, dimana dewan terdiri dari dewan komisaris (dewan pengawas) dan dewan direksi (dewan manajemen). Salah satu fungsi dewan komisaris adalah melakukan monitoring terhadap kinerja direksi sebagai pihak yang mengelola operasional perusahaan (Wardhani, 2006). Dewan komisaris merupakan mekanisme *corporate governance* yang memiliki peranan penting. Menurut Egon Zehnder dalam FCGI (2006), dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dewan komisaris bertanggung jawab dalam mengawasi tugas-tugas manajemen, tetapi dewan komisaris tidak boleh melibatkan diri dalam tugas-tugas manajemen dan tidak boleh mewakili perusahaan dalam transaksi-transaksi dengan pihak ketiga.

Peran dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi *monitoring* terhadap implementasi kebijakan direksi. Secara umum dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Hal ini penting mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan manajemen laba yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan investor. Untuk mengatasinya dewan komisaris diperbolehkan untuk memiliki akses pada informasi perusahaan. Menurut Nasution dan Setiawan (2007), dewan komisaris tidak memiliki otoritas dalam perusahaan, maka dewan direksi bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi terkait dengan perusahaan kepada dewan komisaris. Selain mensupervisi dan memberi

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



nasihat pada dewan direksi sesuai dengan UU No. 1 tahun 1995, fungsi dewan komisaris yang lain sesuai dengan yang dinyatakan dalam *National Committee on Corporate Governance (NCNG)* (2001) adalah memastikan bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosial dan mempertimbangkan kepentingan berbagai *stakeholder* perusahaan sebaik memonitor efektifitas pelaksanaan *good corporate governance*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

5. Meta-Analisis

a. Definisi Meta Analisis

Menurut Lyons (2000), meta analisis adalah sebuah himpunan yang terdiri dari beberapa prosedur statistik yang dirancang untuk mengumpulkan temuan eksperimental dan temuan korelasional dari beberapa penelitian independen yang meneliti beberapa pertanyaan yang terkait satu sama lain. Menurut Dahlan (2012) meta analisis merupakan telaah sistematis yang disertai teknik statistik untuk menghitung kesimpulan beberapa hasil penelitian.

Meta analisis dianggap sebagai analisis dari analisis yang merupakan analisis statistik terhadap sekumpulan temuan hasil analisis dalam jumlah besar yang berasal dari beberapa penelitian dimana analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk mengintegrasikan temuan (Glass dalam Lyons, 2000). Menurut Nindrea (2016), meta analisis merupakan suatu metode yang melakukan analisis secara mendalam terhadap suatu topik dari beberapa penelitian yang dijadikan satu sehingga menyerupai sebuah penelitian besar dengan menggunakan analisis statistik. Meta analisis pada hakekatnya merupakan sintesis sebuah topik yang diambil dari beberapa laporan penelitian. Berdasarkan sintesis tersebut akan ditarik sebuah kesimpulan mengenai topik yang diteliti.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Jenis Prosedur Metode Meta Analisis

Ada dua jenis prosedur metode meta analisis seperti yang dijelaskan oleh Lyons (2000) yaitu:

- (1) Metode yang menggunakan kombinasi antara nilai probabilitas atau skor Z. Prosedur untuk mengkombinasikan Z atau nilai-nilai probabilitas dikembangkan secara paralel oleh beberapa peneliti di era 1930an, yaitu Cochran (1937), Fischer (1932), Pearson (1933) dan Tippett (1931). Prosedur-prosedur ini dikembangkan untuk menjawab kebutuhan di dalam bidang penelitian pertanian saat itu, yaitu kebutuhan untuk mengkombinasikan temuan dari beberapa tes yang independen, yang semuanya direncanakan untuk menguji satu hipotesa yang sama.
- (2) Metode yang kedua, menggabungkan (akumulasi) antara ukuran efek (*effect size*) seperti koefisien korelasi yaitu r . Thorndike (1933) adalah salah satu peneliti pertama yang telah mengakumulasikan temuan dari beberapa peneliti dengan menggunakan korelasi rata-rata. Tujuan dari penelitian Thorndike ini adalah untuk mengintegrasikan berbagai penelitian terhadap masalah kecerdasan.

B. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mencoba membuktikan bagaimana sebenarnya pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen laba. Penelitian meta analisis mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen laba di Indonesia telah dilakukan oleh Eny *et al.*, (2015). Penelitian ini menganalisis hasil-hasil penelitian *corporate governance* terhadap manajemen laba di Indonesia selama tiga belas tahun sejak tahun 2000 sampai 2012. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa



artikel penelitian manajemen laba yaitu artikel penelitian yang terpublikasi baik di jurnal yang diterbitkan di Indonesia maupun di luar negeri dan artikel penelitian yang berasal dari prosiding Simposium Nasional Akuntansi. Jumlah penelitian yang relevan dan memenuhi kriteria ditemukan sebanyak 27 artikel hasil penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian meta analisis ini yang mengintegrasikan hasil penelitian untuk melihat pengaruh terhadap manajemen laba antara lain, kepemilikan institusi, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, kualitas audit dan konsentrasi kepemilikan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepemilikan institusi, kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit dan kualitas audit memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan ukuran dewan komisaris dan konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Penelitian meta analisis juga dilakukan oleh Hwang dan Lin (2008) yang mengintegrasikan hasil dari 27 studi terkait topik pengaruh kualitas audit dan komite audit terhadap manajemen laba. Hasil dari meta analisis yang dilakukan membuktikan bahwa tidak adanya hubungan antara keberadaan komite audit dengan manajemen laba berdasarkan uji gabungan *Unweighted Stouffer*, namun jika menggunakan tes *Weighted Stouffer* hasilnya membuktikan adanya hubungan positif. Selain itu, pengujian ini juga membuktikan adanya hubungan negatif antara independensi komite audit, ukuran komite audit frekuensi rapat komite audit, auditor *Big 6/5/4*, penggunaan auditor spesialis industri, dan independensi auditor dengan manajemen laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Ujijantho dan Agus Pramuka (2007) menguji tentang pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba pada perusahaan *go public* sektor manufaktur di Indonesia. Sampel yang digunakan sebanyak 30 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2002-2004. Studi ini



membuktikan bahwa kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba. Di sisi lain, kepemilikan institusional, jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba yang di proksi oleh *discretionary accruals*.

Penelitian yang dilakukan oleh Midiastuty dan Machfoedz (2003), melakukan penelitian tentang hubungan pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen laba. Periode penelitian dimulai dari tahun 1995 sampai dengan 2000 dengan menggunakan metode *purposive sampling* dimana dengan mengambil sampel seluruh perusahaan yang bukan termasuk dalam kelompok industri, perbankan dan asuransi. Variabel independen dari penelitian ini yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan ukuran dewan direksi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen tersebut berpengaruh terhadap manajemen laba.

Penelitian Chtourou *et al.*, (2001) menguji pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen laba di Amerika Serikat. *Corporate Governance* diwakili oleh variabel ukuran dewan komisaris dan komite audit. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil populasi perusahaan di Amerika Serikat pada tahun 1996. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Boediono (2005) menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba. Penelitian ini mengamati seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dengan periode pengamatan dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2002. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komposisi dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba secara signifikan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Siregar dan Utama (2005) melakukan penelitian untuk melihat pengaruh struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan praktek *corporate governance* terhadap pengelolaan laba. Periode penelitian ini adalah periode non krisis (1995-1996 dan 1999-2002). Sampel dari penelitian ini yaitu 144 perusahaan yang terdaftar di BEJ dengan mengecualikan perusahaan dalam industri keuangan, real estat dan properti, serta telekomunikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sementara variabel kepemilikan institusional, ukuran KAP, proporsi dewan komisaris independen, keberadaan komite audit tidak terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba.

Penelitian Sumanto dan Kiswanto (2014) melakukan pengujian untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEJ dari tahun 2010-2012 yang dipilih menggunakan purposive sampling sehingga mendapatkan sampel sebanyak 90 perusahaan. Hasil dari penelitian ini membuktikan kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Setiawan (2007) menguji pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen laba di industri perbankan Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek Jakarta selama periode 2000-2004. Sampel dari penelitian ini sebanyak 20 sampel perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Xie *et al.*, (2003) melakukan penelitian untuk melihat pengaruh dewan komisaris komite audit. Sampel penelitian ini sebanyak 282 perusahaan yang diambil dari *S&P 500 index* dengan periode tahun 1992, 1994 dan 1996. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dewan komisaris dan komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba. Penelitian Rajgopal *et al.*, (1999) menguji 1541 perusahaan di pasar modal Amerika periode 1989-1995. Hasil penelitiannya menemukan adanya hubungan negatif antara kepemilikan institusional dengan manajemen laba.

Penelitian Prajitno dan Christiawan (2013) bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, komite audit, komisaris independen, dan reputasi KAP terhadap aktivitas manajemen laba. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan dalam sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 2009-2011 sebanyak 17 sampel. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil uji hipotesis, penelitian ini membuktikan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap aktivitas manajemen laba. Sedangkan komisaris independen dan reputasi kantor akuntan publik berpengaruh signifikan terhadap aktivitas manajemen laba.

Astuti (2007) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh. Populasi penelitian ini adalah semua perusahaan publik yang terdaftar (BEJ) dengan periode penelitian tahun 1996-2003 dan sampel sebanyak 34 perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan kepemilikan institusional dan manajerial tidak terbukti berpengaruh terhadap manajemen laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Guna dan Herawaty (2010) bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme *corporate governance*, independensi auditor, *leverage*, kualitas audit, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Penelitian ini menggunakan 40 perusahaan manufaktur yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling* selama periode penelitian 2006 sampai 2008. Data dianalisis dengan menggunakan metode



regresi berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa leverage, kualitas audit dan profitabilitas berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. Artinya, *leverage*, kualitas audit oleh ukuran perusahaan audit dan keuntungan atau kerugian yang dilaporkan oleh manajemen akan memotivasi manajemen dalam melakukan praktik manajemen laba.

Penelitian Widyaningdyah (2001) bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh reputasi auditor, jumlah dewan direksi, leverage, dan persentase saham yang ditawarkan kepada publik saat IPO terhadap *earnings management* pada perusahaan yang melakukan IPO (*Initial Public Offerring*) di Bursa Efek Jakarta pada tahun 1994 sampai dengan 1997. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya faktor leverage yang berpengaruh signifikan terhadap *earnings management*.

Penelitian Tarjo (2008) menguji pengaruh konsentrasi kepemilikan institusional dan *leverage* terhadap manajemen laba. Populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ) untuk periode 2004-2005 dan didapatkan sebanyak 102 perusahaan sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh konsentrasi kepemilikan institusional dan *leverage* terhadap manajemen laba.

Penelitian Jayengsari dan Soetedjo (2013) menguji pengaruh *good corporate governance*, kualitas audit, kompensasi bonus, dan ukuran perusahaan terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Periode penelitian ini adalah tahun 2009-2011 dengan sampel sebanyak 90 perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba. Sedangkan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kompensasi bonus, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Penelitian Pradipta (2011) menguji mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba. Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek



Jakarta periode 2004 dan tidak tergolong perusahaan industri pertanian, pertambangan, properti, transportasi, keuangan, jasa serta konstruksi. Sampel penelitian ini sebanyak 89 perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba. Sedangkan investor institusional, kepemilikan manajerial, susunan komite audit, dan DER tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Penelitian Aygun *et al.*, (2014) menguji struktur kepemilikan dan ukuran dewan direksi terhadap manajemen laba di Turki. Sampel penelitian ini adalah 230 perusahaan di Turki selain perusahaan keuangan seperti bank dan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Istanbul (ISE) periode 2009 – 2012. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan ukuran dewan direksi terhadap manajemen laba.

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba

Menurut (Eisenhardt, 1989) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri. Begitu pula sama halnya dengan manajer yang akan bertindak untuk memperoleh manfaat terutama bagi dirinya sendiri dengan cara melakukan manajemen laba. Perilaku manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda. Oleh karena itu kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan dianggap berpengaruh terhadap tindakan manajemen laba.

Dilihat dari sisi/ konteks kepentingan sebagai *principal*, semakin tinggi manajer memiliki saham perusahaan di tempat ia bekerja, maka tindakan manajemen laba akan semakin rendah. Hal ini dikarenakan manajer juga memiliki kepentingan



sebagai pemilik saham (*principal*) yang membutuhkan laporan keuangan yang akurat untuk ikut menentukan keputusan yang diambil dalam pengelolaan perusahaan.

Dengan adanya pengambilan keputusan yang tepat, perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang maksimal yang berdampak pada dividen yang diterima para pemegang saham termasuk manajer yang mempunyai kepemilikan saham. Pemikiran ini didukung dengan hasil penelitian Eny *et al.*, (2015), Midiastuty dan Machfoedz (2003), Ujiyantho dan Agus Pramuka (2007).

Namun jika dilihat dari sisi/ konteks kepentingan bonus, walaupun manajer memiliki persentase saham yang tinggi, tindakan manajemen laba tetap akan tinggi. Hal ini dikarenakan manajer lebih cenderung untuk mementingkan bonus yang akan diterimanya atas tindakan manajemen laba yang ia lakukan. Bagi manajer, nilai bonus yang akan diterima dianggap lebih besar dari pada dividen atas kepemilikan sahamnya di perusahaan ia berinvestasi sekaligus bekerja. Pemikiran ini didukung dengan hasil penelitian Boediono (2005) dan Aygun *et al.*, (2014).

2. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba

Kepemilikan institusional dianggap memiliki pengaruh terhadap tindakan manajemen laba oleh manajer. Dilihat dari sisi/ konteks kepemilikan jangka panjang, semakin tinggi kepemilikan saham oleh pihak institusional, semakin tinggi juga tingkatan manajemen laba. Hal ini dikarenakan beberapa pihak institusional cenderung mementingkan kelangsungan usahanya dengan ikut serta membeli saham perusahaan yang dapat mencukupi akan kebutuhan bahan baku usahanya. Pihak investor institusional lebih mementingkan keuntungan yang akan didapatkannya dari usaha jangka panjangnya dari pada hanya sekedar memikirkan tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dimana tempat mereka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menanamkan sahamnya. Pemikiran ini didukung dengan hasil penelitian Boediono (2005).

Dilihat dari sisi/ konteks persentase kepemilikan, semakin tinggi kepemilikan saham oleh pihak institusional, maka tindakan manajemen laba akan semakin rendah. Hal ini dikarenakan investor yang biasanya memiliki saham cukup besar dalam suatu perusahaan cenderung akan mencari informasi lebih banyak serta mengawasi tindakan-tindakan manajer sehingga akan mengurangi tindakan manajemen laba. Investor institusional akan melakukan *monitoring* secara efektif dan tidak akan mudah diperdaya dengan tindakan manipulasi yang dilakukan manajer. Menurut Wardhani (2006), adanya kepemilikan saham investor institusional yang tinggi ini maka pemegang saham institusional ini dapat menggantikan atau memperkuat fungsi *monitoring* dari dewan dalam perusahaan. Pemikiran ini didukung dengan hasil penelitian Tarjo (2008), Midiastuty dan Machfoedz (2003), serta Sumanto dan Kiswanto (2014).

3. Pengaruh ukuran dewan direksi terhadap manajemen laba

Dewan direksi memiliki wewenang dalam menetapkan kebijakan dan pedoman kerja sebagai acuan operasional perusahaan serta pengelolaan sumber daya perusahaan. Dalam suatu perusahaan jumlah atau komposisi dewan direksi disesuaikan dengan kebutuhan untuk menjalankan fungsi *fiduciary* dan memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.

Ukuran dewan direksi dianggap berpengaruh terhadap manajemen laba. Dilihat dari sisi/ konteks peran yang efektif, semakin besar ukuran dewan direksi dalam perusahaan, maka tindakan manajemen laba semakin kecil. Hal ini dikarenakan para dewan direksi dapat saling berkoordinasi secara efektif untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menentukan kebijakan sebagai pedoman dalam mengelola perusahaan. Adanya kebijakan ketat yang ditetapkan dewan direksi membuat pihak manajer akan sulit untuk melakukan tindakan manajemen laba. Pemikiran ini didukung dengan hasil penelitian Aygun *et al.*, (2014).

Dilihat dari sisi/ konteks peran yang tidak efektif, semakin besar ukuran dewan direksi dalam perusahaan, maka tindakan manajemen laba oleh manajer akan semakin tinggi. Hal ini dikarenakan ukuran dewan direksi yang terlalu besar membuat peran dewan direksi sulit berkoordinasi dan lebih lama dalam hal pengambilan keputusan sehingga manajer dapat memanfaatkan hal ini untuk melakukan tindakan manajemen laba. Pemikiran ini didukung dengan hasil penelitian Midiastuty dan Machfoedz (2003) dan Pradipta (2011).

4. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba

Menurut KNKG (2006), anggota dewan komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan. Dewan komisaris yang memiliki fungsi *monitoring* dianggap berpengaruh terhadap tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen.

Dilihat dari sisi/ konteks peran yang efektif, semakin besar ukuran dewan komisaris dalam perusahaan, maka tindakan manajemen laba semakin kecil. Hal ini dikarenakan para dewan komisaris dapat memaksimalkan perannya dalam mengawasi manajer dalam mengelola perusahaan, sehingga manajer akan membuat laporan keuangan menjadi lebih kredibel dan takut jika melakukan manajemen laba.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pemikiran ini didukung dengan hasil penelitian Xie *et al.*, (2003), Sumanto dan Kiswanto (2014).

Dilihat dari sisi/ konteks peran yang tidak efektif, semakin besar ukuran dewan komisaris dalam perusahaan, maka tindakan manajemen laba oleh manajer akan semakin tinggi. Hal ini dikarenakan ukuran dewan komisaris yang terlalu besar dapat membuatnya tidak efektif dan menyulitkan dalam menjalankan perannya diantaranya kesulitan dalam berkomunikasi dan mengkoordinir kerja dari masing-masing anggota dewan itu sendiri, kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan dari manajemen. Konsekuensinya, manajer dapat memanfaatkan kondisi ini untuk lebih leluasa dalam melakukan tindakan manajemen laba. Pemikiran ini didukung dengan hasil penelitian Nasution dan Setiawan (2007).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

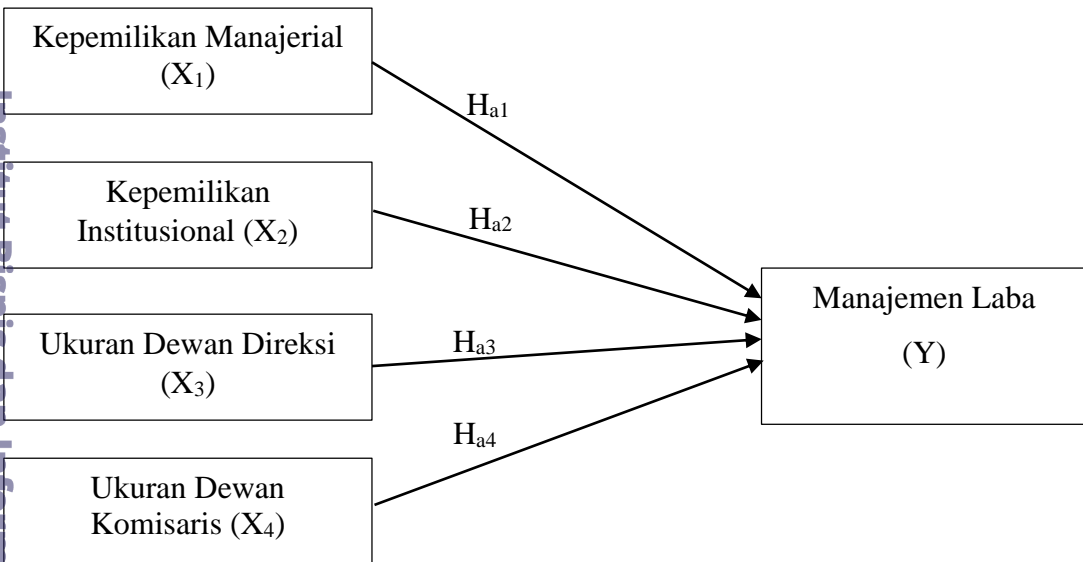
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran





D. Hipotesis Penelitian

- H_{a1} : Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba.
- H_{a2} : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba.
- H_{a3} : Ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap manajemen laba.
- H_{a4} : Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.